

	News Title : Bappebti Beri Izin Calon Pedagang Fisik Aset Kripto Kepada 28 Perusahaan	
	Media Name : Tribunnews.com	Journalist : Endrapta Ibrahim Pramudhiarz
	Publish Date : 07 April 2023	Tonality : Positive
	News Page :	News Value : 3,000,000
	Resources : Didid Noordiatmoko (Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti))	Ads Value : 1,000,000
	Section/Rubrication : New Economy	Topic : Izin Calon Pedagang Fisik Aset Kripto

Bappebti Beri Izin Calon Pedagang Fisik Aset Kripto Kepada 28 Perusahaan

Jumat, 7 April 2023 09:21 WIB
Penulis: Endrapta Ibrahim Pramudhiarz
Editor: Hendra Gunawan



Kelembagaan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Didid Noordiatmoko memberi izin kepada 28 perusahaan calon pedagang fisik aset kripto.

Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiarz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Didid Noordiatmoko menyebut, hingga saat ini, pihaknya telah memberi izin 28 perusahaan calon pedagang fisik aset kripto.

"Masyarakat dapat bertransaksi aset kripto melalui 28 perusahaan yang telah mengantong izin dari Bappebti. Sehingga, ini sudah jelas legalitasnya.

Jenis aset kripto yang dapat diperdagangkan ada 383 dan diatur dalam Peraturan Bappebti Nomor 11 Tahun 2022," jelas Didid dalam keterangannya di Jakarta, dikopi Jumat (7/4/2023).

Baca Juga: Update Harga Kripto, Senin 3 April 2023: Bitcoin dan Ethereum Melemah

Perusahaan calon pedagang aset fisik kripto yang telah terdaftar di Bappebti adalah PT Indodax Nasional Indonesia, PT Crypto Indonesia Berkat/Tokocrypto, PT Zipmex Exchange Indonesia, PT Indonesia Digital Exchange, PT Pintu Kemana Saja, PT Luno Indonesia LTD, PT Cipta Koin Digital, PT Tiga Irid Utama, dan PT Ubit Exchange Indonesia.

Selanjutnya PT Belemingku Dotcom Indonesia, PT Tumbuh Investasi Berkas, PT Kusonek Digital Asset, PT Galad Koin Indonesia, PT Kripto Maksima Koin, PT Mitra Kripto Sukses, PT Pantheras Teknologi Internasional, PT Aset Digital Indonesia, dan PT Pedagang Aset Kripto.



Kemudian PT Tumbuh Bersama Nano, PT Utama Aset Digital Indonesia, PT Combit Digital Indonesia, PT Kagum Teknologi Indonesia, PT Bumi Santosa Cemerlang, PT Gudang Kripto Indonesia, PT Ventura Koin Nusantara, PT Sentra Browewe Indonesia, PT CTICG Indonesia Berkarya, dan PT Cyranexa Exchange Indonesia.

Didid mengatakan perdagangan berjangka merupakan bisnis yang saat ini berkembang, sangat kompleks, dan memiliki sifat high risk high return sehingga diperlukan tata kelola dan pengaturan yang baik.

"Perdagangan berjangka perlu diatur dalam rangka melindungi masyarakat dari praktik perdagangan ilegal serta memberi kepastian hukum dan kepastian berusaha bagi semua pihak yang terlibat," ujar Didid.

Menurut Didid, menghadapi tantangan teknologi rantai blok (blockchain), aset kripto dinilai dapat mempengaruhi sektor keuangan.

Untuk itu, pada tahun ini telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Baca Juga: Update Harga Kripto, Kamis 30 Maret 2023: Bitcoin dan Ethereum Menguat

"Tebeteraan UU P2SK ini memiliki tujuan yang forward looking, mengantisipasi risiko masa depan, perlindungan konsumen/investor," ujar Didid.

Beberapa ruang lingkup yang diatur dalam UU ini antara lain penguatan kelembagaan sektor keuangan; penguatan tata kelola keuangan; dukungan pembiayaan pembangunan yang berkesinambungan; perlindungan konsumen; serta literasi, inklusi, dan inovasi sektor keuangan.

Berkaitan dengan hal tersebut, peran Bappebti dalam tata kelola perdagangan aset kripto akan berpindah menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan masa transisi 2 tahun.

Melalui UU P2SK, diharapkan koordinasi dan penguatan peran kementerian dan lembaga terkait dalam mengatur penyelenggaraan perdagangan aset kripto menjadi lebih baik.

"Masih berkaitan dengan UU P2SK, Bappebti akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka penyiapan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai amanat UU Nomor 4 Tahun 2023. Penyusunan RPP khususnya terkait masa transisi pengalihan pengawasan derivatif keuangan dan aset kripto," ungkap Didid.